

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2017**



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

KATA PENGANTAR

PERPRES Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pematapan ketahanan pangan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut dan sejalan dengan Permentan 135/2013, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2017 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Sasaran dan indikator kinerja utama harus sesuai dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 (Revisi 2), sedangkan targetnya ditetapkan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan dana.

RKT BKP Tahun 2017 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka pendek (tahunan), dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Jakarta,

Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Gardjita Budi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum	4
Bab 2. TUGAS DAN FUNGSI	5
A. SEKRETARIAT BADAN.....	6
B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN.....	6
C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	7
D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.....	8
Bab 3. VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
A. Visi	9
B. Misi.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Sasaran	10
E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan	10
F. Strategi Badan Ketahanan Pangan.....	11
Bab 4. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
A. Program.....	14
B. Kegiatan	15
Lampiran 1.	22
Lampiran 2.	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga

yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang saat ini diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals/SDGs*, dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.

Sesuai tugas dan fungsinya tahun 2015 – 2019 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peran serta instansi terkait sesuai dengan masing-masing program yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders/pemangku* kepentingan di pusat dan daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tahun 2017 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan aksinya sebagai berikut :

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, yaitu: (a) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA); dan (b) Kawasan Mandiri Pangan.
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu: (a) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM); dan (b) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI).
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan, yaitu : (a) Pemberdayaan pekarangan pangan; (b) Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga; dan (c) Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan

informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; serta (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan.

Pada tahun 2017 Badan Ketahanan Pangan, juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun kedelapan, dengan program aksinya adalah "Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*SOLID* dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga". Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2017, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan tugas fungsi kelembagaan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan pencapaian target diversifikasi pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan Tahun 2017, antara lain: penyusunan IKU Tahun 2017 dan penyusunan Perjanjian Kinerja oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.010/8/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 (Revisi 2);
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
5. Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2017.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. SEKRETARIAT BADAN;
2. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN;
3. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN;
4. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.

A. SEKRETARIAT BADAN

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
2. Pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya **Ketahanan Pangan** yang berlandaskan **Kedaulatan** dan **Kemandirian Pangan**”

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 terutama pada aspek ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

B. Misi

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015-2019, yaitu:

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

C. Tujuan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- 1 Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- 2 Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- 3 Memperkuat sistem distribusi pangan;
- 4 Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
- 5 Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

D. Sasaran

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
5. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu.

E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang

meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi harga dan pasokan pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan keamanan pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

F. Strategi Badan Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
5. Penanganan keamanan pangan segar.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui:
 - a. Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - b. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA);
 - c. Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta intervensi dan mitigasi penanganan rawan/kurang Pangan;
 - d. Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan;
 - e. Kajian Responsif dan Antisipatif;
 - f. Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil, melalui:
 - a. Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - b. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan;
 - c. Pengembangan pemasaran dan produksi pertanian;
3. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan, melalui:
 - a. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
 - b. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM);
 - c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI);
 - d. Pemantauan pasokan harga pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
 - e. Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta tindak lanjut gejolak harga pangan;
 - f. Kajian Responsi dan Antisipatif Distribusi Pangan;
 - g. Kajian Distribusi Pangan.
4. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, melalui:
 - a. Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - b. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;

- c. Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Analisis pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
- e. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga;
- f. Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Memperhatikan butir-butir kebijakan ketahanan pangan dan mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah (a) Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam; (b) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan; (c) Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen; (d) Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; serta (e) Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu. Adapun indikator kinerja sasaran program (outcome) tahun 2017 sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	1. Skor PPH Ketersediaan	92,04
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1%
3. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP
	4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (cv) a. Beras a. Cabe Merah • Bawang Merah	< 10% < 27% < 17%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	5. Konsumsi Energi	2.077 Kkal/Kap/hr
	6. Konsumsi Pangan Hewani	208 gram/kap/hr
	7. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	5,87%
	8. Skor PPH Konsumsi	88,40
5. Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu	9. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	10%
	10. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	≥ 80%

B. Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan beserta sub kegiatannya diuraikan berikut ini :

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun.

Kegiatan tersebut dibagi dalam 4 (empat) subkegiatan yang meliputi : (1) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan; (2) Penanganan Kerawanan Pangan dengan mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (3)

Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan; serta (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID).

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan**, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui pola pengembangan Kawasan Mandiri Pangan perbatasan, Kawasan Mandiri Pangan kepulauan, Kawasan Mandiri Pangan di Papua dan Papua Barat, serta Desa Mandiri Pangan reguler.
- b. **Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)**, adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Kegiatan dipadukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan yang dilaksanakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta intervensi melalui penyediaan dana bansos yang disediakan dengan APBD.
- c. **Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan**, kegiatan untuk melaporkan perkembangan ketersediaan dan kerawanan pangan, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang;
- d. **Peningkatan model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/ *Smallholder Livelihood Development (SOLID)***, yang bekerjasama dengan *International Food for Agricultural Development (IFAD)* di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2017 adalah (a) pengembangan kawasan mandiri pangan sebanyak 978 Kawasan; (b) penanganan daerah rawan pangan (SKPG) di Pusat; (c) tersusunnya laporan pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan sebanyak 24 laporan di 24 provinsi; (e) Jumlah pemberdayaan petani kecil sebanyak 27.060 KK; (f) Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan sebanyak 224 desa, (g) Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran sebanyak 27.060 KK, (h) Jumlah dokumen manajemen SOLID sebanyak 12 dokumen di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- 1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat,** adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya melalui pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra produksi padi dan jagung selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;
- 2. Penguatan Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat,** yaitu Penguatan LDPM yang merupakan upaya stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan dalam masa panen raya maupun paceklik melalui pemberdayaan Gapoktan yaitu tahun kedua diberikan bantuan pemerintah sebagai

tambahan modal usaha pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan unit cadangan pangan;

- 3. Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan,** adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan harga pangan;

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan tahun 2017 adalah : (a) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat sebanyak 900 gapoktan; (b) Penguatan Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 98 gapoktan; (c) Data/informasi pasokan dan harga pangan sebanyak 35 laporan.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan,** yaitu kegiatan untuk mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan: (1) pengembangan K-RPL untuk penguatan konsumsi di tingkat rumah tangga; (2) optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam penyuluhan pangan dan gizi; (3) pemberdayaan kelompok wanita sebagai usaha mikro kecil bidang pangan dalam pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan;
- 2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan,** adalah upaya untuk membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga, dengan diimbangi konsumsi

pangan hewani, sayuran dan buah yang dilaksanakan antara lain melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, kerjasama dengan lintas sektor dan swasta;

- 3. Hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan,** adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan keamanan pangan segar;

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2017 adalah : (a) Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan sebanyak 1.671 desa; (b) Jumlah lokasi P2KP sebanyak 24 rekomendasi; (c) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan sebanyak 35 rekomendasi.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor.

Sasaran output kegiatan adalah terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1. Perencanaan, penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan,** yaitu aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
- 2. Pemantauan dan evaluasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan,** adalah kegiatan pemantauan program dan kegiatan ketahanan pangan secara periodik dilaporkan, serta evaluasi setiap semester untuk perbaikan kegiatan kedepan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah;

- 3. Penanganan organisasi kepegawaian, humas, tata usaha dan hukum**, adalah aktivitas pelayanan organisasi kepegawaian, humas, tata usaha dan hukum terhadap operasional kantor Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- 4. Pelayanan Keuangan dan Perlengkapan**, adalah aktivitas pelayanan keuangan dan perlengkapan untuk menjalankan operasional sekretariat
- 5. Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan**, merupakan kegiatan koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
- 6. Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah**

Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 adalah: (a) Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan sebanyak 12 dokumen, (b) Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan sebanyak 12 laporan, (c) Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum sebanyak 1 dokumen, (d) Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan sebanyak 35 dokumen, (e) Layanan operasional perkantoran selama 1 tahun; (f) Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) laporan.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan

Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

Lampiran 1.**Rencana Kegiatan dan Pendanaan
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017**

No	Kegiatan	Pusat (Rp. Juta)	Daerah (Rp. Juta)	Jumlah (Rp. Juta)
1	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	26.769,28	116.023,60	142.792,88
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	16.130,00	153.804,33	169.934,33
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	11.125,00	56.509,50	67.634,50
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	54.724,19	16.800,00	71.524,19
Jumlah		108.748,47	343.137,43	451.885,90

Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1.	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	78 Kawasan	14.646,00	24 Provinsi, 141 Kab/Kota
2.	Penanganan Kerawanan Pangan dengan mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Lokasi	10.750,00	Pusat
3.	Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan		10.750,00	

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
	- Analisis FSVA	1 Peta FSVA	600,00	Pusat
	- Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	34 Laporan	1.700,00	34 Provinsi
	- Pemantauan Ketersediaan dan kerawanan pangan	24 Rekomendasi	5.900,00	Pusat dan 24 Provinsi
4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID)	14 Pusat/Prop/Kab	109.196,88	Pusat, 2 Prop, 11 Kab
Jumlah			142.792,88	

Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)	900 Unit	140.027,33	Pusat, 31 prop.
2.	Penguatan Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat		7.657,00	
	- Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	98 Gap	7.657,00	26 provinsi sentra produksi pangan
3.	Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan		22.250,00	
	- Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN	35 Lokasi	7.500,00	Pusat dan 34 provinsi
	- Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan	4 Rekomendasi	14.000,00	Pusat

	- Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan	1 Judul	750,00	Pusat
Jumlah			169.934,33	

Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1.671 Desa	42.209,50	34 provinsi dan 315 kab/kota
2	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		25.425,00	
	- Pemantauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	24 Rekomendasi	5.250,00	Pusat dan 24 provinsi
	- Gerakan Diversifikasi Pangan	42 Lokasi	7.425,00	Pusat dan 34 provinsi
	- Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	35 Rekomendasi	3.200,00	Pusat dan 34 provinsi
3	Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	35 Rekomendasi	9.550,00	Pusat, 34 provinsi
Jumlah			67.634,50	

Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Layanan dukungan manajemen Badan Ketahanan Pangan		37.210,25	
	- Penyusunan Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama	35 Dokumen	7.926,75	Pusat dan 34 provinsi
	- Keuangan dan Perlengkapan	35 Dokumen	5.400,00	Pusat, 34 provinsi
	- Pemantauan dan Evaluasi Program	36 Laporan	8.900,00	Pusat, UPSUS, 34 provinsi
	- Kepegawaian, Organisasi, Humas, dan Hukum	3 Dokumen	3.998,00	Pusat
	- Sidang Pleno, Konferensi dan Sidang Regional Ketahanan Pangan, DKP	1 Laporan	4.385,50	Pusat (DKP)
	- Dukungan Manajemen dan Administrasi Daerah	12 Bulan layanan	6.600,00	34 provinsi, 315 kab/kota
2	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	33.290,44	Pusat
3	Layanan Internal (Overhead)	12 Layanan	1.023,50	Pusat
Jumlah			71.524,19	

Lampiran 2.**Rencana Kinerja Tahunan
Badan Ketahanan Pangan**

Unit Eselon I : Badan Ketahanan Pangan
Tahun : 2017

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	1. Skor PPH Ketersediaan	92,04
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1%
3. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP
	4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (cv) a. Beras a. Cabe Merah • Bawang Merah	< 10% < 27% < 17%
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	5. Konsumsi Energi	2.077 Kkal/Kap/hr
	6. Konsumsi Pangan Hewani	208 gram/kap/hr
	7. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	5,87%
	8. Skor PPH Konsumsi	88,40
5. Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu	9. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	10%
	10. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	≥ 80%